

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa besar dengan luas perairan laut mencapai 3,25 juta km², memposisikan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi maritim nasional. Potensi hasil perikanan laut, khususnya ikan tangkapan, mencapai 38,3 juta ton per tahun menunjukkan kekayaan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal (Batubara, 2016). Namun, pemanfaatan nilai tambah dari hasil tangkapan ikan masih terbatas karena mayoritas nelayan mengandalkan penjualan ikan segar tanpa melalui proses pengolahan yang memadai, sehingga tidak memperoleh manfaat ekonomi yang seharusnya mereka terima dari sumber daya yang telah mereka tangkap dengan risiko tinggi (Qomariyah & Nur Anifa, 2020). Kondisi kemakmuran sumber daya alam yang tidak terdistribusi ke masyarakat nelayan mencerminkan adanya gap dalam rantai nilai perikanan nasional yang memerlukan transformasi sistemik.

Provinsi Kepulauan Riau, yang berposisi strategis di pesisir barat Indonesia dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam, menjadi salah satu sentra produksi perikanan nasional dengan potensi signifikan. Pada semester pertama tahun 2024, total volume produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 153.218,99 ton dengan nilai produksi Rp 4.636.164.326.398, menunjukkan kontribusi besar sektor perikanan terhadap perekonomian daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2024). Sektor pengolahan perikanan juga berkembang signifikan dengan total produksi olahan mencapai 7.426.393 ton pada periode yang sama, di mana Kota Batam mendominasi dengan 67% dari total produksi. Meskipun Kota Tanjung Pinang tercatat dengan volume produksi tangkap terendah (1.509,6 ton) dan nilai produksi Rp 59.456.155.000, kota ini memiliki potensi substansial dalam pengembangan industri pengolahan hasil laut yang belum tergali secara maksimal. Data Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kepulauan Riau yang mencapai 69,64 kg per kapita pada 2024

menunjukkan permintaan domestik yang kuat dan peluang pasar lokal yang signifikan untuk produk pengolahan ikan.

Provinsi Kepulauan Riau, yang berposisi strategis di pesisir barat Indonesia dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam, menjadi salah satu sentra produksi perikanan nasional dengan potensi signifikan. Pada semester pertama tahun 2024, total volume produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 153.218,99 ton dengan nilai produksi Rp 4.636.164.326.398, menunjukkan kontribusi besar sektor perikanan terhadap perekonomian daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2024). Sektor pengolahan perikanan juga berkembang signifikan dengan total produksi olahan mencapai 7.426.393 ton pada periode yang sama, di mana Kota Batam mendominasi dengan 67% dari total produksi. Meskipun Kota Tanjung Pinang tercatat dengan volume produksi tangkap terendah (1.509,6 ton) dan nilai produksi Rp 59.456.155.000, kota ini memiliki potensi substansial dalam pengembangan industri pengolahan hasil laut yang belum tergali secara maksimal. Data angka konsumsi ikan (AKI) di Kepulauan Riau yang mencapai 69,64 kg per kapita pada 2024 menunjukkan permintaan domestik yang kuat dan peluang pasar lokal yang signifikan untuk produk pengolahan ikan.

Data lapangan dari survei terhadap 49 pelaku usaha pengolahan hasil laut di wilayah Kampung Bugis dan sekitarnya menunjukkan kondisi kritis yang memerlukan perhatian serius. Struktur pendidikan formal pelaku IKM sangat rendah dengan 53,7% lulusan SD, 29,3% SMP, dan hanya 2,4% berpendidikan sarjana (dari 41 responden yang menjawab), mengindikasikan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen bisnis dan adopsi teknologi modern (Data Empiris, 2025). Status usaha yang didominasi oleh 93,9% usaha perorangan (46 dari 49 responden), dengan hanya 2% berbentuk kelompok dan 0% koperasi, menunjukkan fragmentasi sektor IKM yang ekstrem dan lemahnya daya tawar kolektif dalam rantai pasokan. Struktur ini mempersulit akses modal, sertifikasi, dan pemasaran skala besar yang memerlukan pengorganisasian kelembagaan yang lebih solid dan terintegrasi. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan industri kecil memerlukan "penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan

kewirausahaan" melalui "perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan", kondisi yang belum terpenuhi di tingkat lapangan ini.

Data menunjukkan bahwa 62% bahan baku utama diperoleh dari pasar umum, hanya 28% langsung dari nelayan lokal, 8% melalui pengumpul/pemodal, dan 2% dari tempat pelelangan ikan (TPI), mencerminkan sistem intermediasi yang merugikan kedua belah pihak (Data Empiris, 2025). Kendala kritis yang dihadapi 60,5% pelaku IKM adalah fluktuasi harga bahan baku—dengan 26 responden melaporkan harga ikan tongkol, tamban, dan udang yang melonjak pada musim sulit, sementara 18,6% menghadapi permasalahan bahan baku musiman yang tidak tersedia dan ketiadaan *cold chain* logistics yang memadai. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan menegaskan pentingnya "penanganan bahan baku pada saat pengolahan ikan" yang meliputi "penerapan cara pengolahan ikan yang baik dan prosedur operasi standar sanitasi," namun kondisi ini sulit dicapai oleh IKM tanpa akses ke *cold storage* dan sistem logistik terintegrasi yang komprehensif.

Sistem pembayaran termin yang umum diterapkan dalam pemasaran produk IKM menciptakan krisis likuiditas yang mengancam keberlanjutan operasional usaha skala kecil. Sebanyak 45,8% pelaku IKM menyatakan bahwa sistem termin pembayaran "sangat berdampak menyulitkan" pada modal kerja mereka, dengan 25% menyatakan "cukup berdampak," sedangkan total dampak negatif mencapai 70,8% dari 24 responden yang menjawab (Data Empiris, 2025). Konsekuensi praktis dari kendala ini sangat serius: 33,3% responden mengalami kesulitan membeli bahan baku baru, 30% terhambat produksi, 16,7% harus mencari pinjaman usaha, dan 10% mengalami keterlambatan pembayaran gaji karyawan. Untuk mengatasi krisis modal ini, 26,3% pelaku IKM meminta akses pembiayaan jangka pendek, 26,3% meminta subsidi bahan baku/logistik, dan 21,1% meminta dukungan koperasi simpan pinjam (Data Empiris, 2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 21 mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan "pembiayaan yang dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan persyaratan dan prosedur yang mudah, murah, dan cepat," namun realisasi kebijakan ini masih jauh dari target di lapangan, khususnya bagi IKM yang tidak memiliki jaminan fisik atau *track record* formal.

Produk olahan yang dihasilkan sektor IKM di Kampung Bugis dan Senggarang menunjukkan tingkat diversifikasi rendah dan ketergantungan pada produk konvensional dengan nilai jual terbatas. Kerupuk ikan mendominasi dengan 30,8% dari 65 unit produk yang dilaporkan, diikuti bakso ikan (20%), empek-empek (12,3%), kerupuk udang (12,3%), pindang (10,8%), abon ikan (4,6%), dan *frozen seafood* (9,2%) (Data Empiris, 2025). Hanya 34,7% dari 49 pelaku IKM berencana melakukan diversifikasi produk, dengan hambatan utama berupa modal terbatas (15,8%), kekurangan alat produksi (26,3%), harga bahan baku yang naik (15,8%), kesulitan mencari bahan baku (15,8%), dan cuaca buruk yang mempengaruhi pasokan (10,5%) (Data Empiris, 2025). Standar keamanan pangan dan persyaratan regulasi juga menjadi hambatan signifikan untuk pengembangan produk IKM: sebanyak 24% responden menunjukkan kendala berupa tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, 8% tidak memiliki sertifikasi PIRT, dan 8% tidak memenuhi standar Halal. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan dan berbagai SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk olahan ikan memang ketat namun merupakan investasi esensial untuk akses pasar formal dan perlindungan konsumen jangka panjang.

Hanya 28,3% dari 46 pelaku IKM yang menjawab telah melakukan kerjasama pemasaran formal, dengan mitra mencakup industri pengolahan besar (25%), *marketplace* online (25%), distributor besar (15%), supermarket/ritel modern (15%), dan lainnya (20%), menunjukkan keterbatasan akses pasar modern dan digital yang dimiliki sektor IKM (Data Empiris, 2025). Bentuk kerjasama yang terjalin masih didominasi pemasaran produk (52,9%), diikuti pasokan bahan baku setengah jadi (17,6%), subkontrak produksi (11,8%), dan *co-branding* (5,9%), mencerminkan peran IKM yang masih subordinat dalam rantai nilai (Data Empiris, 2025). Ketika ditanya tentang potensi kerjasama dengan industri besar, responden IKM menunjukkan preferensi untuk distribusi/konsinyasi via *marketplace* (36,96%), pemasok bahan baku setengah jadi (26,09%), penjualan produk ke industri besar (21,74%), dan jual produk dengan merek industri (10,87%), menunjukkan ambisi mereka untuk integrasi vertikal dalam perikanan yang lebih luas (Data Empiris, 2025). Namun, 71,7% masih belum memiliki kerjasama formal, dengan alasan utama: kapasitas produksi tidak stabil (20%), tidak memenuhi

standar mutu/keamanan pangan (24%), tidak memiliki sertifikasi (4%), tidak memenuhi standar halal (8%), kurang percaya diri atas kualitas (12%), dan tidak tahu cara memulai kerjasama (20%) (Data Empiris, 2025). Kondisi ini mencerminkan ketidakselarasan antara aspirasi IKM untuk berkembang dengan keterbatasan kapasitas institusional dan teknis yang mereka miliki.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan struktural, para pelaku IKM menunjukkan optimisme signifikan terhadap solusi terpadu yang dapat meningkatkan daya saing mereka: 82,6% percaya bahwa sistem logistik bersama atau rantai pasokan terintegrasi akan membantu bisnis mereka secara substansial (Data Empiris, 2025). Jenis dukungan yang paling diharapkan dari industri besar adalah bantuan teknologi dan teknis produksi IKM (32,7%), peningkatan kualitas dan standarisasi produk (25,5%), pendampingan desain dan pengemasan produk (16,4%), dan penjaminan pembelian hasil produksi (20%) (Data Empiris, 2025). Dari pihak sentra IKM, ekspektasi mencakup fasilitasi mesin dan desain produk (36,4%), pemasok bahan baku terpadu (42,4%), penyediaan fasilitas pengujian mutu dan standarisasi produk (45,5%), dan ruang pelatihan pembinaan manajemen (27,3%) (Data Empiris, 2025). Kerangka regulasi juga mendukung transformasi IKM ini: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 24 menyebutkan "Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan" dan "dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri," sementara PERMEN KKP No. 59 Tahun 2021 menetapkan standar untuk "penanganan bahan baku, pengolahan hasil perikanan, dan distribusi hasil perikanan" yang dapat dijadikan acuan pengembangan IKM lokal.

Berdasarkan analisis kondisi lapangan di atas, terdapat gap kritis antara potensi sumber daya perikanan Kota Tanjung Pinang dengan realisasi nilai tambah yang diterima oleh masyarakat nelayan dan pelaku IKM pengolahan. Penelitian ini berusaha mengintegrasikan perspektif pemberdayaan ekonomi lokal melalui optimisasi sistem produksi dan proses, keberlanjutan operasional-ekologis yang didukung oleh efisiensi teknis dan manajemen sumber daya, dan inklusivitas dalam akses teknologi serta pengetahuan manajemen industri untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang

actionable, berbasis bukti empiris, dan selaras dengan kerangka regulasi perikanan nasional (UU No. 31/2004), pengembangan industri kecil (UU No. 20/2008).

Berangkat dari kompleksitas tantangan yang bersifat sistemik dan multidimensi tersebut, intervensi yang bersifat parsial dinilai tidak lagi memadai untuk mengurangi kompleksitas permasalahan IKM di Kampung Bugis dan Senggarang. Diperlukan pendekatan holistik yang mampu merekonstruksi hubungan antareleman dalam sistem IKM pengolahan hasil laut menjadi satu sinergi yang saling menguatkan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk membangun kerangka konseptual sekaligus strategis melalui penyusunan Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pengolahan Hasil Laut (Studi Kasus: Kampung Bugis dan Senggarang, Kota Tanjung Pinang). Strategi ini diarahkan untuk memetakan struktur permasalahan secara komprehensif sekaligus merumuskan skenario pengembangan yang menyelaraskan kebijakan pemerintah, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, sehingga tercipta industri kecil dan menengah yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah menerapkan *Soft Systems Methodology* maupun *Interpretive Structural Modeling* untuk mengkaji pengembangan industri kecil, namun keduanya umumnya digunakan secara terpisah dan pada konteks yang berbeda. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaduan kedua pendekatan tersebut dalam satu alur yang berkesinambungan SSM sebagai alat untuk memetakan situasi permasalahan yang belum terstruktur, dan ISM untuk menstrukturkan serta memprioritaskan program perubahan yang diterapkan secara spesifik pada konteks permukiman pesisir Kampung Bugis dan Senggarang. Dengan menautkan hasil analisis pada program pembangunan daerah, penelitian ini diharapkan menghasilkan strategi yang tidak hanya kuat secara analitis, tetapi juga kontekstual dan implementatif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil analisis data pelaku usaha, maka rumusan masalah Penelitian ini yaitu bagaimana merancang strategi pengembangan IKM pengolahan hasil laut di Kampung Bugis dan Senggarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, tujuan Penelitian ini adalah merancang strategi pengembangan IKM pengolahan hasil laut di Kampung Bugis dan Senggarang.

1.4 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan Penelitian yang telah disajikan, berikut adalah beberapa batasan Penelitian ini:

1. Penelitian dilakukan pada IKM pengolahan hasil laut di dua lokasi, yaitu Kampung Bugis dan Senggarang, Kota Tanjung Pinang, sehingga hasil strategi yang dirumuskan bersifat spesifik terhadap kondisi kedua lokasi tersebut dan tidak dapat langsung digeneralisasi ke wilayah lain tanpa menjalankan ulang seluruh tahapan metodologi.
2. Penilaian hubungan antarprogram pada ISM dilakukan oleh panel tiga narasumber (dua regulator dan satu akademisi) melalui mekanisme *expert judgment*, sehingga hasil hierarki program mencerminkan perspektif panel tersebut dan dapat berbeda apabila komposisi atau jumlah narasumber berubah.
3. Penelitian tidak membahas aspek teknis detail proses produksi, perancangan mesin, maupun formulasi produk olahan hasil laut.
4. Penelitian tidak mencakup analisis finansial secara rinci seperti studi kelayakan investasi, analisis keuntungan usaha, dan perhitungan ekonomi teknik.

1.5 Pentingnya Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena:

1. Membantu pelaku IKM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan riil, hambatan, serta strategi

optimal untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah produk, dan keberlanjutan usaha olahan hasil laut.

2. Menyediakan dasar pertimbangan dan rekomendasi akademik bagi penyusunan kebijakan, program pendampingan, serta inovasi teknologi yang diperlukan untuk mendorong kemandirian dan pertumbuhan industri olahan hasil laut di Kampung Bugis dan Senggarang.
3. Mengarahkan praktek kolaborasi multipihak dan integrasi pemasaran berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan modal, fasilitas produksi, serta akses pasar pada IKM yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.
4. Berperan dalam upaya pelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi komunitas lokal melalui penguatan usaha yang adaptif dan berkelanjutan.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, pentingnya penelitian, dan sistematika penelitian tesis. Bagian ini menjelaskan alasan dilaksanakannya penelitian serta arah kajian dalam pengembangan IKM pengolahan hasil laut di Kota Tanjung Pinang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan IKM, perancangan strategi pengembangan IKM, serta metodologi yang relevan. Seluruh referensi diperoleh dari sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan laporan Penelitian terkini.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan tahapan Penelitian yang digunakan, meliputi studi pendahuluan, studi literatur yang berkaitan, metode penelitian yang digunakan serta tahapan penelitian.

BAB 4. PERANCANGAN MODEL

Bab ini menguraikan tahap 1-4 metode SSM berupa mengidentifikasi permasalahan, pembuatan *rich picture*, menentukan *Root Definition* dan CATWOE serta membangun model konseptual.

BAB 5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tahap 5-7 dari metode SSM, yaitu mengidentifikasi gap analysis dari kondisi saat ini dan kondisi ideal lalu menguraikan prioritas program perubahan dengan ISM serta tahap akhir menyusun aktivitas operasional berdasarkan program.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan Penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan serta saran yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan selanjutnya dalam pengembangan sentra IKM pengolahan hasil laut di kawasan pesisir Kota Tanjung

